

PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI KEPOLISIAN DALAM RAZIA GABUNGAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Rahmat Ridwan

0501120071

Dan Hery Suryadi

(Ridwan.rahmat87@yahoo.com)

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze the implementation of the joint coordination of the police in a raid in the city of Pekanbaru and to identify and analyze the factors inhibiting the implementation - implementation of joint coordination of the police in a raid in the city of Pekanbaru.

Theoretical concepts used in this study were under Soewarno Handayani (2003:218) in the coordination have characteristics: (a) responsibility, (b) the work process, (c) work setting on a regular basis, (d) the concept of unity action, and (e) the purpose of coordination.

The population is made the object of research staff involved in implementing the joint raid between traffic cop, Revenue and Department of Transportation (DLAJJR). For sample withdrawal techniques Personnel engaged in joint raids relatively large considering the population sampled using purposive sampling technique.

Based on the results of research on the implementation of the coordination function of the police in a joint raid vehicles the results are quite good where as many as 23 respondents or 48.93% is dominated by an indicator of the work process in any implementation of a joint raid in the city of Pekanbaru, the reasons respondents gave responses such as the work done apparatus requires cooperation or labor union called coordination.

From the results of this study concluded that the coordinating there are also several factors that the constraints include: lack of willingness of the leadership in the coordination, the lack of guidance by the leader to subordinate spirit, no desire of the authorities not to carry out the work in accordance with the result of the division is the maximum, the functions of government agencies not run well, it is not the holding of regular meetings of the joint raid about execution order and the absence of officers in carrying out their duties.

Keywords: Implementation, Coordination Function, Police

A. Latar Belakang Masalah

Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Perangkat atau pemerintah daerah disini adalah pemerintah yang terdiri dari pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau yang tengah berkembang dengan pesatnya, memerlukan pihak-pihak yang berkompeten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga terdapat instansi atau lembaga yang diberikan wewenang penuh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Polisi yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan maka dapat diketahui fenomena-fenomena yang dijumpai antara lain :

- a. Masih belum maksimalnya pihak Kepolisian dalam melakukan hubungan koordinatif dengan pihak terkait lainnya dalam melakukan razia kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pihak kepolisian jarang melibatkan instansi terkait lainnya sehubungan dengan razia gabungan misalnya pihak Dinas Perhubungan (DLLAJ)
- b. Masih belum berjalannya program-program kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengerahkan secara terpadu pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor dilapangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, misalnya berapa kali razia dilakukan setiap bulannya, dan mengevaluasi hasil yang dicapai atas pelaksanaan razia yang dilakukan.
- c. Saat melakukan razia gabungan kendaraan bermotor di lapangan, pihak kepolisian sering menyelesaikan permasalahan yang timbul langsung ditempat dan jarang memberikan surat tilang bagi pelaku pelanggaran tertib lalu lintas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok dalam penulisan penelitian ini yaitu “**Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Kepolisian Dalam Razia Gabungan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru.**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi kepolisian dalam razia gabungan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan koordinasi kepolisian dalam razia gabungan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi jajaran Kepolisian Kota Pekanbaru mengenai keberhasilan tugas yang dilakukan aparatnya khususnya dengan pelaksanaan koordinasi kepolisian
- b. Sebagai bahan informasi serta keterangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya atau semua pihak yang ingin mendalami masalah sumber daya manusia.

D. Konsep Teoritik

Koordinasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Orang mengatakan bahwa koordinasi adalah hasil akhir dari pada komunikasi. Sejumlah dari pada unit dimana seseorang dapat mengkoordinasikan berdasarkan atas jenjang pengendaliannya, sebagian besar ditentukan oleh kemampuan atas berkomunikasi dengan mereka.

Pada setiap organisasi yang kompleks setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya maksimal agar dapat diperoleh hasil secara keseluruhan.

Menurut Soewarno Handyaningrat (2000:88) pengertian koordinasi adalah hasil akhir dari komunikasi dari sejumlah unit dimana seseorang dapat mengkoordinasikan berdasarkan atas rentang/jenjang pengendalian sebagian besar yang ditentukan atas kemampuan berkomunikasi.

Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapatnya koordinasi adalah ditujukan untuk lebih memberikan kejelasan dan kepastian akan pekerjaan yang diharapkan dari pihak yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, apakah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan diharapkan adanya kejelasan akan tugas atau pekerjaan membawa kepada kelancaran aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Soewarno Handyaningrat (2003:218) dalam melaksanakan koordinasi memiliki ciri-ciri :

1. Tanggung jawab
2. Adanya proses kerja
3. Pengaturan kerja secara teratur
4. Konsep kesatuan tindakan
5. Tujuan koordinasi

Dengan demikian tanpa koordinasi, unit-unit bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional dalam organisasi akan kehilangan pandangan tentang peran mereka didalam organisasi yang bersangkutan, mereka akan mengejar kepentingannya masing-masing tanpa menghiraukan apakah akan mengorbankan tujuan yang lebih besar yaitu tujuan organisasi.

E. Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran

A. Konsep Operasional.

Untuk menciptakan kesatuan bahas, makna, serta persepsi atau untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing masing konsep tersebut yaitu sebagai berikut ;

- Pelaksanaan adalah cara melakukan atau menjalankan suatu pekerjaan/tugas yang telah direncanakan
- Koordinasi adalah usaha penyesuaian setiap bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan daripada bagian tersebut selesai pada waktunya dan masing-masing memberikan sumbangan usaha semaksimal mungkin
- Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Razia gabungan adalah melakukan razia di lapangan terhadap pelanggar ketertiban lalu lintas yang melibatkan pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam kegiatan razia gabungan kendaraan bermotor seperti kepolisian, Dinas Perhubungan (DLLAJ), dan pihak Dispenda.
- Adanya tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- Adanya proses kerja adalah suatu usaha kerja sama. Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu yang bekerja sama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Konsep Kesatuan Tindakan adalah inti dan pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha / tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu yang bekerja sama. didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama untuk meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

B. Teknik Pengukuran

1. Adanya tanggung jawab dengan kriteria :

- Menjalankan wewenang penuh
- Mampu menjalankan tugas
- Dapat bertindak tegas

Pengukurannya dikatakan :

Baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai dengan tanggung jawab pimpinan mencakup 3 kriteria diatas

Cukup baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai dengan tanggung jawab pimpinan mencakup 2 dari 3 kriteria diatas

Kurang baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai dengan tanggung jawab pimpinan hanya mencakup 1 dari 3 kriteria diatas

2. Adanya proses kerja dengan kriteria :

- Metode kerja
- Pelaksanaan tugas
- Mekanisme kerja

Pengukurannya dikatakan

Baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai proses kerja mencakup 3 kriteria diatas

Cukup baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai proses kerja mencakup 2 dari 3 kriteria diatas

Kurang baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai proses kerja hanya mencakup 1 dari 3 kriteria diatas

3. Pengaturan kerja secara teratur dengan kriteria :

- Adanya usaha
- Adanya kerjasama
- Keteraturan pekerjaan

Pengukurannya dikatakan :

Baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai pengaturan kerja secara teratur mencakup 3 kriteria diatas

Cukup baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai pengaturan kerja secara teratur mencakup 2 dari 3 kriteria diatas

Kurang baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai pengaturan kerja secara teratur hanya mencakup 1 dari 3 kriteria diatas

4. Konsep kesatuan tindakan dengan kriteria :

- Bertindak tepat waktu
- Mengedepankan pelayanan prima
- Pelaksanaan tugas secara terarah

Pengukurannya dikatakan ;

Baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai kesatuan tindakan mencakup 3 kriteria diatas

Cukup baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai kesatuan tindakan mencakup 2 dari 3 kriteria diatas

Kurang baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai kesatuan tindakan hanya mencakup 1 dari 3 kriteria diatas

5. Memiliki tujuan koordinasi dengan kriteria :

- Kesadaran tinggi
- Komunikasi
- Keselarasan tugas

Pengukurannya dikatakan :

Baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai dengan memiliki tujuan koordinasi mencakup 3 kriteria diatas

Cukup baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai dengan tujuan koordinasi mencakup 2 dari 3 kriteria diatas

Kurang baik : Apabila pelaksanaan koordinasi dalam razia gabungan kendaraan bermotor disertai dengan tujuan koordinasi hanya mencakup 1 dari 3 kriteria diatas

F. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dalam karya ilmiah ini dilakukan di Kantor Satlantas Pekanbaru Jalan Ahmad Yani. Populasi sebagai keseluruhan dari subjek penelitian sedangkan sample merupakan pihak-pihak yang dijadikan fokus penelitian. Populasi disini terdiri pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan razia gabungan antara Polantas, Dispenda dan Dinas Perhubungan (DLLAJR).

G. Analisa dan Pembahasan

Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja aparat yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka Kepala Kantor sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan perannya, memerlukan suatu koordinasi, koordinasi adalah tindakan seseorang manajer/pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas/ pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/bagian yang satu dengan orang/bagian yang lain, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpang siuran, ketidak tepatan serta double pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di Satlantas Pekanbaru maka koordinasi merupakan upaya untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah di satu pihak dengan masyarakat dipihak lain. Begitu pula dalam pelaksanaan tugas di Satlantas Pekanbaru yang merupakan tanggung jawab Kepala Kantor, maka demi terwujudnya efektivitas kerja di organisasi yang dipimpinnya Pimpinan harus melakukan koordinasi kerja dengan pegawai yang ada dan juga dengan masyarakat yang berurusan di organisasi tersebut dengan tujuan agar dalam pelaksanaan tugas di Satlantas Pekanbaru yang dipimpinnya dapat serasi dan selaras dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat

1. Tanggung Jawab Pada Pimpinan

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan tanggung jawab pimpinan dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini :

Tabel III.5 : Tanggapan Responden Berdasarkan Tanggung Jawab Pimpinan

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	13	27,66
2.	Cukup baik	23	48,94
3.	Kurang baik	11	23,40
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi berdasarkan tanggung jawab pimpinan didominasi oleh tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 23 orang atau 48,94% alasan responden memberikan tanggapan ini karena tanggung jawab pimpinan yang diberikan kepada bawahan dengan adanya mampu memimpin dan kesadaran melaksanakan tugas.

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 13 orang atau 27,66% alasan responden memberikan tanggapan ini karena tanggung jawab pimpinan yang diberikan kepada bawahan dengan adanya bertindak tegas, mampu memimpin dan kesadaran melaksanakan tugas. Kemudian tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 11 orang atau 23,40% alasan responden memberikan tanggapan ini karena tanggung jawab pimpinan yang diberikan kepada bawahan hanya dengan didukung kesadaran melaksanakan tugas.

2. Adanya proses kerja

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan adanya proses kerja dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini :

Tabel III.6 : Tanggapan Responden Berdasarkan Adanya Proses Kerja

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	14	29,79
2.	Cukup baik	25	53,19
3.	Kurang baik	8	17,02
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi berdasarkan adanya proses kerja didominasi oleh tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 25

orang atau 53,19% alasan responden memberikan tanggapan ini karena proses kerja yang dilakukan oleh bawahan dilakukan dengan berkesinambungan dan dilakukan pengembangan.

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 14 orang atau 29,79% alasan responden memberikan tanggapan ini karena proses kerja yang dilakukan oleh bawahan dilakukan dengan berkesinambungan, dilaksanakan, dilakukan pengembangan. Kemudian tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 8 orang atau 17,02% alasan responden memberikan tanggapan ini karena proses kerja yang dilakukan oleh bawahan hanya dilakukan dengan berkesinambungan.

3. Pengaturan kerja secara teratur

Dalam suatu organisasi peran serta pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting bagi organisasi tersebut di dalam proses pencapaian tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, sehingga dengan kemampuan yang ada pada pegawai dapat bekerja dengan disiplin dalam arti pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan pengaturan kerja secara teratur dilihat dari tanggapan responden berikut ini :

Tabel III.7 : Tanggapan Responden Berdasarkan Pengaturan Kerja Secara teratur

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	16	34,04
2.	Cukup baik	22	46,81
3.	Kurang baik	9	19,15
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi berdasarkan pengaturan kerja secara teratur didominasi oleh tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 22 orang atau 46,81% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengaturan kerja secara teratur yang dilakukan oleh bawahan dilakukan apabila adanya usaha pencapaian efisiensi kerja dan menghindari overlapping.

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 16 orang atau 34,04% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengaturan kerja secara teratur oleh aparat dilakukan apabila adanya konsep kerja, usaha pencapaian efisiensi kerja dan menghindari overlapping. Kemudian tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 9 orang atau 19,15% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengaturan kerja secara teratur yang dilakukan bawahan apabila adanya konsep kerja, usaha pencapaian efisiensi kerja dan menghindari overlapping.

4. Adanya Kesatuan Tindakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa aset terpenting dalam suatu organisasi adalah manusia yang berperan dalam kegiatan pencapaian organisasi. Organisasi tergantung kepada orang tanpa orang organisasi tidak dapat berjalan. Orang atau *Human Resources* bertanggung jawab menggerakkan kegiatan dan penggunaan *non Human Resources* untuk mencapai tujuan.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan adanya kesatuan tindakan dilihat dari tanggapan responden berikut ini.

Tabel III.8 : Tanggapan Responden Berdasarkan Adanya kesatuan tindakan

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	15	31,91
2.	Cukup baik	23	48,94
3.	Kurang baik	9	19,15
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi berdasarkan adanya kesatuan tindakan didominasi oleh tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 23 orang atau 48,94% alasan responden memberikan tanggapan ini karena adanya kesatuan tindakan yang dilakukan oleh bawahan dilakukan karena mencakup keserasian dalam mencapai hasil, pengaturan jadwal kerja.

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 15 orang atau 31,91% alasan responden memberikan tanggapan ini karena adanya kesatuan tindakan mencakup pengaturan pekerjaan, keserasian dalam mencapai hasil, pengaturan jadwal kerja. Kemudian tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 9 orang atau 19,15% alasan responden memberikan tanggapan ini karena kesatuan tindakan yang dilakukan bawahan karena mencakup keserasian dalam mencapai hasil, pengaturan jadwal kerja.

5. Memiliki Tujuan dan Kesatuan Organisasi

Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan apabila para manjer dan anggotanya mengerti dan memahami dengan benar tentang organisasi. Karena, organisasi tersebut dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku dan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, pendefinisian organisasi yang banyak dilakukan oleh para ahli sekurang-kurangnya mempunyai unsur-unsur adanya manusia atau orang-orang yang bekerjasama, adanya kerjasama itu sendiri, dan adanya tujuan organisasi yang telah disepakati.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan adanya kesatuan tindakan dilihat dari tanggapan responden berikut ini :

Tabel III.9 : Tanggapan Responden Berdasarkan Memiliki tujuan dan Kesatuan Organisasi.

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	14	29,79
2.	Cukup baik	21	44,48
3.	Kurang baik	12	25,52
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi berdasarkan memiliki tujuan dan kesatuan organisasi didominasi tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 21 orang atau 44,48% alasan responden memberikan tanggapan ini karena adanya kesatuan tindakan yang dilakukan oleh bawahan dilakukan karena memiliki perencanaan kerja, adanya keinginan untuk bekerja sama dan keikutsertaan dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 14 orang atau 29,79% alasan responden memberikan tanggapan ini karena memiliki perencanaan kerja, adanya keinginan untuk bekerja sama dan keikutsertaan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 12 orang atau 25,52% alasan responden memberikan tanggapan ini karena memiliki perencanaan kerja, adanya keinginan untuk bekerja sama dan keikutsertaan dalam pelaksanaan tugas kerja, usaha pencapaian efisiensi kerja dan menghindari overlapping.

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dimuka berikut akan penulis sajikan tabel rekapitulasi pada tabel berikut ini :

Tabel III.10 : Rekapitulasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kordinasi Kepolisian Dalam

No.	Tanggapan	Tanggapan responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tanggung jawab pada pimpinan	13 (27,66)	23 (48,94)	11 (23,40)	47 (100)
2.	Adanya proses kerja	14 (29,79)	25 (53,19)	8 (17,02)	47 (100)
3.	Pengaturan kerja secara teratur	16 (34,04)	22 (46,81)	9 (19,15)	47 (100)
4.	Adanya kesatuan tindakan	15 (31,91)	23 (48,94)	9 (19,15)	47 (100)
5.	Memiliki tujuan dan kesatuan organisasi	14 (29,79)	21 (44,68)	12 (25,53)	47 (100)
	Jumlah	72	114	49	235
	Rata-rata	15	23	9	47
	Persentase	(31,91)	(48,93)	(19,15)	(100)

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi kepolisian, dimana dominasi tanggapan cukup baik sebanyak 23 orang atau 48,93% yang didominasi oleh indikator adanya proses kerja sebanyak 25 orang atau 53,19%, alasan responden memberikan tanggapan ini karena proses kerja yang dilakukan aparat memerlukan kerja sama atau kesatuan kerja yang disebut koordinasi, tanpa adanya proses kerja yang terjalin antara sesama pegawai maka koordinasi tidak akan tercipta. Secara teratur, disini aparat melakukan pengaturan kerja

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 15 orang atau 31,91% yang didominasi oleh indikator pengaturan kerja sebanyak 16 orang atau 34,04% alasan responden memberikan tanggapan ini karena disini aparat sudah baik melakukan pengaturan kerja.

Kemudian tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 9 orang atau 19,15% yang didominasi oleh indikator memiliki tujuan dan kesatuan organisasi yang ditanggapi sebanyak 12 orang atau 25,53% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pelaksanaan koordinasi yang dilakukan sejauh ini kurang memperhatikan adanya kesatuan pencapaian tujuan organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi kurang tercapai dengan maksimal.

H.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dijumpai dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, antara lain :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan fungsi koordinasi kepolisian dalam razia gabungan kendaraan bermotor hasilnya cukup baik ditanggapi sebanyak 23 responden atau 48,93% yang didominasi oleh indikator adanya proses kerja, alasan responden memberikan tanggapan ini karena proses kerja yang dilakukan aparat memerlukan kerja sama atau kesatuan kerja yang disebut koordinasi.
2. Dalam melaksanakan koordinasi juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain :
 - Kurangnya keinginan dari pimpinan dalam mendelegasikan wewenang terhadap pihak terkait atau bawahnya dalam hal razia gabungan serta tidak adanya keinginan dari aparat untuk tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil pembagian tersebut dengan maksimal.
 - Kurangnya adanya usaha pembinaan semangat oleh pimpinan kepada bawahan
 - tidak diadakannya pertemuan secara rutin dengan instansi terkait seperti dispenda, dan dinas perhubungan dalam hal melakukan razia gabungan serta tidak adanya ketertiban dari aparat terkait dalam melakukan razia gabungan
 - kurangnya kesadaran terhadap pelaksanaan koordinasi bagi tiap-tiap aparat terkait dalam melakukan razia gabungan.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan koordinasi hendaknya memperhatikan apa saja aspek-aspek yang dibutuhkan untuk hal tersebut seperti adanya kapasitas tugas yang jelas, adanya fasilitas komunikasi dan adanya prosedur kegiatan, sehingga pelaksanaan koordinasi dapat lebih tepat dan terarah tujuannya.

2. Dalam menciptakan koordinasi antara pimpinan dengan bawahan dan antar sesama bawahan atau koordinasi antara instansi terkait lainnya sebaiknya dilakukan komunikasi secara terbuka kemudian perlunya diciptakan lingkungan prestasi kerja yang mendukung, adanya peningkatan fleksibilitas kerja aparat serta meningkatkan semangat kerja aparat untuk mencapai hasil pekerjaan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- LAN RI, 2001, *Sistem. Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung
- Gibson James. L, 2007, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Erlangga,
- Handyaningrat Soewarno, 2004, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Haji Masagung
- Hasibuan S.P. Malayu, 2001, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kaloh Jahanis, 2007, *Konsep Koordinasi dalam Proses Administrasi*, Jakarta, Yayasan Karya Dharma IIP
- Ndraha, Talizuhu, 2003, *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nitisemito, Alex S., 2000, *Koordinasi Manajer/Pimpinan*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Nugroho, D.Ryant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia
- Nurcholis, 2005, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sarwoto, 2007, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P., 2002, *Peranan Staff dalam Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung
- Singarimbun Masri, 1999, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta,
- Suryaningrat, Bayu, 2002, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta Winardi, 2004, *Azas-azas Manajemen*, Bandung, Penerbit Alumni
- Westa Pariata, 2005, *Pokok-Pokok Pengertian Manajemen*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung
- Www.google.com wikipedia, *unsur pelaksanaan tugas pokok kepolisian*